



# Membedah Kekerasan dalam Konflik Poso: Analisis Kritis atas Kekerasan Struktural, Kultural, dan Langsung dalam Perspektif Johan Galtung

Aliya Devi Maharani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [maharanialiya2003@gmail.com](mailto:maharanialiya2003@gmail.com)

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Konflik Poso merupakan salah satu konflik komunal yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 hingga 2001. Konflik ini menimbulkan dampak sosial, politik, ekonomi, serta trauma pada manusia yang berkepanjangan. Konflik Poso ini sering dipahami sebagai konflik yang bernuansa agama antara komunitas Muslim dan Kristen. Namun pandangan tersebut cenderung menyederhanakan kompleksitas faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik Poso melalui perspektif Segitiga Kekerasan Johan Galtung yang membagi kekerasan dalam tiga bentuk, yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (literature review) melalui buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan konflik Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik Poso tidak hanya ditandai dengan kekerasan langsung seperti bentrokan antar kelompok, pembunuhan, pertikaian, namun juga dipengaruhi oleh kekerasan struktural yang muncul dalam bentuk ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, kekerasan kultural turut berperan melalui penggunaan identitas agama atau kelompok untuk membenarkan suatu tindakan kekerasan. Perlunya upaya untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan tidak hanya mengenai penghentian kekerasan yang terjadi namun juga mengatasi ketimpangan struktural dan membangun budaya damai dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Konflik Poso, Johan Galtung, kekerasan langsung, kekerasan kultural, kekerasan struktural.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

## PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial manusia yang tidak dapat dihindari dalam dinamika interaksi antarindividu maupun kelompok. Keberagaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, serta keyakinan sering kali menjadi sumber munculnya perbedaan kepentingan yang berujung pada konflik. Dalam perspektif ilmu sosial, konflik dipahami sebagai proses sosial yang terjadi akibat

adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang tidak sejalan (Soekanto, 1993). John mengemukakan bahwa konflik sosial adalah sesuatu yang alamiah, baik dari kejadian konstruktif kebudayaan secara sosial dan proses interaktif (Susan, 2009). Konflik sering dipersepsikan sebagai fenomena negatif yang mengarah pada disintegrasi sosial. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena konflik memiliki potensi konstruktif apabila dikelola secara

## **Membedah Kekerasan dalam Konflik Poso: Analisis Kritis atas Kekerasan Struktural, Kultural, dan Langsung dalam Perspektif Johan Galtung**

*Aliya Devi Maharani*

tepat. Konflik dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas kelompok, meningkatkan kesadaran akan perbedaan, serta mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian masalah yang lebih adil.

Kajian mengenai konflik dan perdamaian memiliki urgensi yang tinggi. Terlebih lagi konflik sosial yang berada di Indonesia yang terkadang masih menjadi masalah yang serius. Salah satu konflik komunal terbesar yang berada di Indonesia dan menyebabkan dampak sosial, politik, dan ekonomi adalah konflik Poso yang terjadi di Sulawesi Tengah pada akhir tahun 1990 hingga 2001. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, namun juga melahirkan trauma sosial yang berkepanjangan, segregasi masyarakat, serta ketegangan antar kelompok agama yang terus membekas pasca konflik. Dalam beberapa literatur atau kajian, konflik poso dipahami sebagai konflik yang bernuansa agama karena disebabkan oleh agama antara komunitas Islam dan Kristen (Khairil, 2020). Namun, pemahaman semacam ini sering kali menyederhanakan kompleksitas persoalan yang sesungguhnya melatarbelakangi kekerasan.

Konflik poso tidak semata-mata dipicu oleh perbedaan keyakinan agama. Namun konflik poso tersebut berkaitan erat dengan persoalan yang lebih kompleks, seperti ketimpangan sosial, perebutan kekuasaan politik lokal, dan marginalisasi kelompok tertentu (Alganih, 2016). Konflik Poso dapat disebut juga sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan berbagai bentuk kekerasan baik yang tampak secara fisik ataupun yang tersembunyi dibalik struktur sosial dan budaya masyarakat. Dalam studi perdamaian, Johan Galtung (1971) mengemukakan konsep segitiga kekerasan atau Triangle of Violence yang membagi kekerasan ke dalam tiga bentuk, yakni kekerasan langsung (direct violence), kekerasan struktural (structural violence), dan kekerasan kultural (cultural violence). Berdasarkan latar belakang tersebut,

penelitian ini bertujuan menganalisis konflik poso melalui kerangka teori segitiga kekerasan Johan Galtung, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar dan dinamika konflik yang terjadi.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review atau studi kepustakaan. Menurut Creswell John. W. Dalam (Habsy, 2017) menyatakan bahwa kajian literatur merupakan ringkasan yang tertulis mengenai artikel dari Jurnal, Buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi dengan baik pada masa lalu ataupun pada saat ini yang mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan kritis terhadap fenomena kekerasan dalam konflik poso melalui perspektif teori segitiga kekerasan dari Johan Galtung. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis mendalam berdasarkan sumber-sumber pustaka yang relevan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Wilayah Dan Tahapan Konflik Poso**

Konflik Poso merupakan konflik yang terjadi di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Poso, yang merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan karakteristik yang kompleks, baik dari sisi demografi maupun dinamika ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kabupaten Poso memiliki luas wilayah yang cukup besar serta kondisi geografis yang beragam, mencakup wilayah pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan pola pemukiman yang ada di Kabupaten Poso relatif menyebar dan terpisah antar wilayah. Berdasarkan analisis Suryadinata dan kawan-kawan dalam (Ilyas, n.d.)

## Membedah Kekerasan dalam Konflik Poso: Analisis Kritis atas Kekerasan Struktural, Kultural, dan Langsung dalam Perspektif Johan Galtung

*Aliya Devi Maharani*

Masyarakat Poso terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Pamona, Napu, Bugis, Jawa, Toraja, Gorontalo, Tojo, dan lainnya.

Keberagamaan etnis tersebut berjalan seiring dengan keberagamaan agama yang dianut oleh masyarakat Poso. Islam dan kristen menjadi dua agama dengan jumlah penganut terbesar di wilayah ini. Daerah perkotaan seperti Poso Kota didominasi oleh masyarakat Muslim, sedangkan di wilayah seperti Tentena dikenal sebagai basis masyarakat Kristen. Kondisi ini menciptakan pola sosial yang cenderung tersegmentasi secara geografis. Namun, Interaksi antar kelompok tetap berlangsung dalam aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Sebelum konflik terjadi, secara aspek sosial, masyarakat Poso dikenal memiliki nilai-nilai kebersamaan yang kuat. Sistem kekerabatan dan adat istiadat memainkan peran penting dalam menjaga hubungan antarindividu maupun kelompok (Khalikin, 2016). Nilai toleransi menjadi bagian dari kehidupan sosial yang telah mengakar sejak lama. Interaksi sosial berlangsung melalui berbagai kegiatan bersama seperti pasar tradisional, kegiatan adat, serta perayaan keagamaan. Kondisi ini mendukung terciptanya kohesi sosial yang cukup stabil.

Kehidupan sosial yang terjadi di Poso sebelum Konflik dikenal relatif harmonis (Khalikin, 2016). Dari sisi ekonomi, masyarakat Poso menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan berskala lokal. Komoditas utama meliputi hasil pertanian seperti kakao, kelapa, dan cengkeh. Aktivitas ekonomi bersifat tradisional dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam. Ketimpangan ekonomi mulai terlihat seiring dengan masuknya kelompok pendatang yang memiliki akses lebih baik terhadap jaringan dan modal. Sebagian kelompok pendatang mampu menguasai sektor-sektor ekonomi tertentu, terutama perdagangan di wilayah perkotaan (Sulhan & Januri, 2022). Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat

lokal yang masih tersisih dalam persaingan ekonomi.

Distribusi pembangunan yang belum merata turut memperkuat ketimpangan tersebut. Infrastruktur di wilayah tertentu berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya. Perbedaan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat menciptakan potensi ketegangan yang laten. Dari sisi politik, situasi di Poso sebelum konflik dipengaruhi oleh dinamika nasional yang sedang mengalami masa transisi dari rezim orde baru menuju era reformasi (Hasrullah, 2009). Perubahan sistem politik membuka ruang bagi kompetisi kekuasaan di tingkat lokal. Persaingan politik di tingkat daerah mulai melibatkan identitas kelompok sebagai basis dukungan.

Elite politik memanfaatkan kedekatan dengan kelompok tertentu untuk memperkuat posisi mereka. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi dalam masyarakat. Distribusi kekuasaan yang tidak merata serta munculnya persepsi ketidakadilan dalam representasi politik memperburuk hubungan antar kelompok. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketegangan sosial.

Konflik Poso merupakan hasil dari rangkaian peristiwa yang berkembang secara bertahap dan saling berkaitan dalam kurun waktu tertentu. Terdapat beberapa tahapan konflik yang terjadi di Poso ini. Tahapan pertama yaitu pada Desember 1998 hingga Januari 1999. Kemudian tahapan kedua, ketiga, dan keempat yaitu pada tahun 2000. Pada tahap kelima yaitu tahun 2001 sebelum perjanjian Malino I. Secara singkat, konflik poso dari perkelahian antara dua pemuda yang berasal dari latar belakang kelompok yang berbeda. Dalam waktu singkat, perkelahian tersebut berkembang menjadi bentrokan antar kelompok yang melibatkan massa dalam jumlah lebih besar. Kerusakan mulai terjadi di beberapa titik, disertai dengan pembakaran rumah serta tindakan kekerasan lainnya. Insiden ini menunjukkan

## Membedah Kekerasan dalam Konflik Poso: Analisis Kritis atas Kekerasan Struktural, Kultural, dan Langsung dalam Perspektif Johan Galtung

*Aliya Devi Maharani*

bagaimana konflik interpersonal dapat berubah menjadi konflik komunal ketika terjadi dalam konteks sosial yang rentan.

Setelah insiden awal, konflik berkembang menjadi gelombang kekerasan yang berlangsung pada akhir tahun 1998 hingga awal 1999. Dalam periode ini, terjadi bentrokan antar kelompok yang meluas ke berbagai wilayah di Poso. Pada Desember 1998 hingga Januari 1999, kekerasan meningkat dengan terjadinya pembakaran rumah warga, perusakan fasilitas umum, serta korban jiwa. Aparat keamanan berusaha mengendalikan situasi, namun konflik terus berlanjut akibat meningkatnya mobilisasi massa dari masing-masing kelompok.

Konflik kembali meningkat pada April 2000 yang dikenal sebagai gelombang kedua konflik Poso. Pada fase ini, kekerasan terjadi dengan intensitas yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih luas dibandingkan periode sebelumnya. Serangan terhadap permukiman warga terjadi di berbagai wilayah, menyebabkan banyak rumah hancur serta meningkatnya jumlah pengungsi. Konflik tidak lagi bersifat spontan, melainkan mulai menunjukkan pola yang lebih terorganisir. Ketegangan kembali meningkat pada Mei hingga Juni 2000. Pada periode ini, kekerasan terjadi secara lebih sistematis dan melibatkan wilayah yang lebih luas. Serangan terhadap desa-desa tertentu dilakukan secara berulang. Tempat ibadah menjadi sasaran dalam beberapa peristiwa, yang semakin memperkuat dimensi keagamaan dalam konflik. Kondisi ini memperdalam polarisasi sosial serta memperbesar jarak antar kelompok masyarakat.

Konflik mencapai puncaknya pada tahun 2001, ketika kekerasan terjadi dalam skala yang lebih luas dan intens. Pada fase ini, muncul kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik. Serangan terjadi secara terkoordinasi di berbagai wilayah. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah korban jiwa serta pengungsian besar-besaran. Situasi keamanan semakin sulit

dikendalikan karena konflik telah berkembang menjadi konflik berkepanjangan dengan berbagai aktor yang terlibat.

Upaya untuk mengakhiri konflik dilakukan melalui Perjanjian Malino yang ditandatangani pada 20 Desember 2001. Perjanjian ini difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan melibatkan perwakilan dari kelompok yang berkonflik. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian kekerasan, penegakan hukum, serta upaya rekonsiliasi sosial.<sup>21</sup> Perjanjian Malino menjadi titik penting dalam proses penyelesaian konflik Poso, meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Berdasarkan sumber literatur, jumlah korban jiwa yang dibunuh selama konflik Poso diperkirakan mencapai sekitar 600 hingga 1.000 jiwa (McRae, 2016). Korban ini berasal dari kedua kelompok yang terlibat dalam konflik, baik masyarakat Muslim maupun Kristen, dengan komposisi yang tidak dapat dipisahkan secara pasti karena keterlibatan konflik yang bersifat komunal. Jumlah korban luka-luka juga sangat besar. Banyak korban mengalami luka serius akibat senjata tajam, senjata api, serta bahan peledak rakitan yang digunakan selama konflik berlangsung. Data menunjukkan bahwa ribuan orang mengalami luka fisik maupun trauma psikologis akibat kekerasan yang terjadi secara berulang dan dalam jangka waktu panjang.

Konflik Poso menyebabkan kerusakan serius pada struktur sosial masyarakat. Terjadi polarisasi tajam antara kelompok Muslim dan Kristen yang sebelumnya hidup berdampingan secara harmonis. Interaksi sosial menurun drastis, ditandai dengan munculnya segregasi wilayah berdasarkan identitas agama. Kepercayaan antar kelompok mengalami penurunan signifikan, sementara trauma psikologis menyebar luas di kalangan masyarakat, terutama korban kekerasan dan pengungsi. Kondisi ini berdampak pada melemahnya kohesi sosial dan memerlukan waktu panjang untuk proses rekonsiliasi.

### **Analisis dengan Teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung**

Konflik Poso dapat dipahami secara lebih mendalam melalui kerangka segitiga kekerasan yang dikembangkan oleh Johan Galtung, yang membagi kekerasan ke dalam tiga bentuk utama: kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan struktural (*structural violence*) dan kekerasan kultural (*cultural violence*) (Galtung, n.d.). Ketiga bentuk kekerasan ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan membentuk sistem yang memperkuat terjadinya konflik. Konflik sebagai manifestasi dari struktur sosial yang timpang serta legitimasi budaya yang mendukung kekerasan.

Kekerasan langsung dalam konflik Poso terlihat jelas melalui berbagai tindakan fisik seperti pembunuhan, pembakaran rumah, penyerangan desa, serta penggunaan senjata dalam bentrokan antar kelompok. Kekerasan ini paling tampak pada periode 2000-2001 ketika konflik mencapai puncaknya. Contoh dari kekerasan langsung adalah serangan terhadap permukiman warga pada April–Juni 2000, di mana rumah-rumah dibakar dan masyarakat dipaksa mengungsi. Selain itu, penggunaan senjata seperti parang, tombak, hingga senjata api rakitan menunjukkan bahwa konflik telah berkembang menjadi kekerasan terbuka yang terorganisir. Dalam perspektif Galtung, kekerasan langsung merupakan bentuk yang paling terlihat, sehingga sering dianggap sebagai inti konflik. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena hanya melihat gejala, bukan akar masalah. Dalam kasus Poso, kekerasan langsung hanyalah puncak dari proses panjang yang melibatkan ketegangan sosial dan politik sebelumnya. Fokus yang terlalu besar pada kekerasan langsung dalam penanganan konflik misalnya melalui operasi keamanan, sering kali hanya menghentikan kekerasan sementara tanpa menyelesaikan penyebab mendasarnya. Hal ini menjelaskan mengapa konflik Poso sempat mereda, kemudian kembali meningkat dalam beberapa gelombang.

Kekerasan struktural dalam konflik Poso berkaitan dengan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang telah berlangsung sebelum konflik terjadi. Ketimpangan ini menciptakan kondisi ketidakadilan yang tidak terlihat secara langsung, namun berdampak pada kehidupan masyarakat. Contoh kekerasan struktural di Poso terlihat dari perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi antara kelompok pendatang dan masyarakat lokal. Kelompok pendatang dalam beberapa sektor ekonomi dianggap lebih dominan, sementara sebagian masyarakat lokal merasa terpinggirkan. Selain itu, distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal juga menjadi sumber ketegangan, terutama dalam konteks perebutan jabatan pemerintahan. Kekerasan struktural juga terlihat dari lemahnya institusi negara dalam mengelola konflik sejak awal. Keterlambatan respons serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat memperparah situasi. Dalam perspektif Galtung, kondisi ini merupakan bentuk kekerasan karena menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan. Analisis kritis menunjukkan bahwa konflik Poso tidak akan mencapai eskalasi tinggi tanpa adanya kekerasan struktural yang mendasarinya. Ketimpangan yang tidak terselesaikan menciptakan “bahan bakar” bagi konflik, yang kemudian dipicu oleh peristiwa kecil menjadi kekerasan besar.

Kekerasan kultural dalam konflik Poso berkaitan dengan nilai, norma, dan keyakinan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan. Dalam konflik ini, identitas agama menjadi faktor utama yang digunakan sebagai legitimasi tindakan kekerasan. Contoh kekerasan kultural terlihat dari penggunaan simbol agama seperti istilah “Putih” dan “Merah” memperkuat pembelahan sosial. Narasi konflik sering dikaitkan dengan pembelaan terhadap agama sehingga kekerasan dianggap sebagai tindakan yang sah secara moral. Penyebaran isu dan propaganda yang memperkuat

## Membedah Kekerasan dalam Konflik Poso: Analisis Kritis atas Kekerasan Struktural, Kultural, dan Langsung dalam Perspektif Johan Galtung

Aliya Devi Maharani

sentimen kelompok turut memperbesar konflik. Informasi yang tidak terverifikasi sering memicu kemarahan dan mempercepat mobilisasi massa. Dalam perspektif Galtung, hal ini menunjukkan bagaimana budaya dapat menjadi alat legitimasi kekerasan struktural dan langsung. Secara kritis, kekerasan kultural merupakan aspek yang paling sulit diatasi karena berakar pada cara berpikir masyarakat. Tanpa perubahan dalam nilai dan persepsi, potensi konflik akan tetap ada meskipun kekerasan fisik telah berhenti. Ketiga bentuk kekerasan ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Kekerasan struktural menciptakan ketidakadilan, kekerasan kultural memberikan legitimasi, dan kekerasan langsung menjadi manifestasi nyata dari keduanya. Sebagai contoh, ketimpangan ekonomi (struktural) menciptakan rasa ketidakpuasan yang kemudian diperkuat oleh narasi identitas agama (kultural), hingga akhirnya memicu bentrokan fisik (langsung). Siklus ini terus berulang selama konflik berlangsung, sehingga konflik menjadi sulit dihentikan secara permanen.

### KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Konflik Poso tidak dapat dipahami sebagai konflik keagamaan antar komunitas Muslim dengan Kristen. Dengan analisis menggunakan teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung, ditemukan bahwa konflik Poso merupakan sebuah Konflik yang melibatkan dan saling berkaitan antara kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung nampak pada bentuk pembunuhan, pembakaran rumah, penyerangan pemukiman, serta berbagai tindakan fisik lainnya yang menyebabkan kerusakan sosial dan korban jiwa. Namun kekerasan langsung tersebut merupakan sebuah manifestasi atau perwujudan dari sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, ialah kekerasan struktural seperti ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang telah berlangsung lama. Disisi lain,

dalam kekerasan kultural dapat dilihat dari penggunaan identitas agama, simbol-simbol kelompok, serta narasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga bentuk kekerasan tersebut saling berkaitan. Konflik Poso di analisis dengan teori Johan Galtung membantu menjelaskan bahwa konflik Poso merupakan hasil dari proses yang panjang dan tidak dapat disederhanakan sebagai konflik bernuansa agama. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa upaya dalam membangun perdamaian tidak cukup hanya dilakukan melalui penghentian kekerasan fisik saja, namun juga perlu disertai dengan penghilangan ketimpangan sosial, ketimpangan struktural, keadilan dalam berpolitik, serta membangun budaya yang mendorong toleransi dan menekankan perdamaian.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan studi kepustakaan sehingga analisis yang dilakukan sangat bergantung pada data dan kajian yang telah tersedia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengalaman masyarakat pascakonflik secara langsung melalui penelitian lapangan agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai proses perdamaian atau rekonsiliasi di Poso. Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila akar kekerasan baik yang bersifat struktural, kultural, atau langsung, dapat langsung ditangani secara menyeluruh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alganah, I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Jurnal Criksetra*, 5.
- Galtung, J. (n.d.). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*.
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1, 90-100.
- Hasrullah. (2009). Dendam Konflik Poso (periode 1998-2001). Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas. (n.d.). Kajian Simbol-Simbol Etnisitas dalam Kampanye, Komunikasi Politik dan

## **Membedah Kekerasan dalam Konflik Poso: Analisis Kritis atas Kekerasan Struktural, Kultural, dan Langsung dalam Perspektif Johan Galtung**

*Aliya Devi Maharani*

- Pergeserannya pada Pemilukada Kabupaten Poso. Universitas Tadulako.
- Khairil, M. (2020). Strategi Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik Poso. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9 No., 266–279.
- Khalikin, A. (2016). Toleransi Beragama di Kabupaten Poso. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 15.
- McRae, D. (2016). Poso: Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama Terpanjang di Indonesia Pasca Reformasi (cetakan pe). CV. Marjin Kiri.
- Soekanto, S. (1993). *Kamus Sosiologi*. PT. Raja, Grafindo Persada.
- Sulhan, M., & Januri, M. R. (2022). Esensi Agama Dalam Konflik Sosial Di Kabupaten Poso Menggunakan Teori Karl Marx : Sebuah Literatur Review The Essence Of Religion In Social Conflict At Poso Regency Using The Theory Of Karl Marx. *Acta Islamica Counsensia: Counselling Research and Applications*, 2(1), 15–28.
- Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Prenada Media Group.